

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu implikasi dari sistem demokrasi adalah terlibatnya semua pihak dalam proses politik yang dilakukan, salah satunya dengan menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu merupakan syarat mutlak bagi negara demokrasi dalam melaksanakan kedaulatan rakyat.<sup>1</sup> Secara umum, sistem Pemilu di Indonesia mencakup Pemilu Legislatif untuk pusat dan daerah dan Pemilu eksekutif untuk Presiden dan Kepala Daerah.<sup>2</sup> Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan mekanisme politik yang disepakati bersama untuk memilih kepala daerah (Gubernur, Wali Kota, dan Bupati).<sup>3</sup> Pilkada diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Aturan ini menjadi dasar pelaksanaan Pilkada yang bertujuan sebagai sarana melaksanakan demokratisasi di tingkat lokal guna melahirkan kepemimpinan daerah yang berkualitas, amanah, akuntabel, dan mengutamakan kepentingan rakyat.

Pilkada menjadi bagian dari pemilihan yang secara prosedural dan substansial mencerminkan kaidah pokok demokrasi, serta penegakan kedaulatan rakyat yang diatur secara khusus untuk memastikan akuntabilitas dan kualitas demokrasinya. Pelaksanaan Pilkada akan menghasilkan legitimasi politik dan mekanisme sirkulasi elit yang sehat akan terbangun.<sup>4</sup> Oleh karena itu, Pilkada yang dilakukan secara langsung menjadi mekanisme rekrutmen kepala daerah yang terbingkai dalam sistem pemilihan demokratis. Pippa Norris mengidentifikasi tahapan-tahapan dalam proses rekrutmen politik yaitu (1) *certification* (sertifikasi) yakni proses yang menetapkan siapa yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai calon kandidat, (2) *nomination* (nominasi) yang melibatkan orang-orang yang

---

<sup>1</sup> Parbuntian Sinaga. 2018. Pemilihan Umum Kepala Daerah dalam Kontruksi UUD NRI 1945. *Binamulia Hukum*. Volume 7 Nomor 1. Hlm 17-25.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie. 2006. *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Konstitusi Press. Hlm 172

<sup>3</sup> Asrinaldi. 2020. *Sisi Lain Pilkada*. Padang; CV Rumah Kayu Pustaka Utama. Hlm 11

<sup>4</sup> Hendra Sudjarat, et al. 2022. *Politik Hukum Pemilu*. Padang; PT Global Eksekutif Teknologi. Hlm 89

memenuhi syarat dan permintaan dari penyeleksi ketika memutuskan siapa yang dicalonkan, (3) *election* (pemilihan) atau *election stage* merupakan langkah terakhir yang menentukan yakni siapa yang akan memenangkan Pilkada.<sup>5</sup>

Secara normatif, pelaksanaan Pilkada memiliki peran krusial dalam memperkuat fondasi demokrasi di tingkat daerah pada indikator demokrasi, Pilkada menawarkan sejumlah manfaat bagi pertumbuhan, pendalaman, dan perluasan demokrasi lokal.<sup>6</sup> Pertama, sistem demokrasi langsung melalui Pilkada akan membuka ruang partisipasi bagi masyarakat dalam proses demokrasi dan menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal. Kedua, dari sisi kompetisi politik, Pilkada memungkinkan munculnya secara lebih besar preferensi kandidat-kandidat yang bersaing serta memungkinkan masing-masing kandidat berkompetisi dalam ruang yang lebih terbuka. Ketiga, sistem Pilkada akan memberi peluang bagi warga negara untuk mengaktualisasi hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa harus direduksi oleh kepentingan-kepentingan elite politik. Keempat, Pilkada akan memperbesar harapan untuk mendapatkan figure pemimpin yang aspiratif, kompeten, dan *legitimate*. Kelima, kepala daerah yang terpilih melalui Pilkada akan memiliki legitimasi politik yang tinggi sehingga akan terbangun perimbangan kekuatan di daerah.

Pencalonan kepala daerah memerlukan kendaraan politik<sup>7</sup> dan dukungan untuk memenangkan Pilkada, sehingga setiap partai politik memiliki hak untuk memilih pasangan calon kepala daerah untuk didukung dan diusung, baik bersama koalisi partai politik maupun pengusung tunggal.<sup>8</sup> Dukungan pasangan calon kepala daerah ini diperoleh dari kelompok partisan maupun kelompok di luar area lingkaran partai politik. Kelompok pendukung ini akan menjadi sebuah jaringan

<sup>5</sup> Pippa Norris. 2014. "Recruitment", dalam *Handbook Partai Politik*, ed. Richard S. Katz dan William Crotty, (edisi terjemahan). Bandung: Penerbit Nusa Media. Hlm. 148-149.

<sup>6</sup> Suharizal. 2012. *Pemilukada, Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm 38-39

<sup>7</sup> Kendaraan politik yang dimaksud adalah partai politik, maksudnya adalah untuk bisa mencalonkan seseorang sebagai kepala daerah dan ikut serta dalam pilkada, calon tersebut "diusung" oleh partai politik.

<sup>8</sup> Cindy Indira Firdausi. 2017. Jaringan Politik Dalam Pilwali Surabaya Tahun 2015 Studi Peran Pemuda PIS dalam Mendukung Pencalonan Risma –Whisnu. *Jurnal Politik Muda*. Volume 6 Nomor 1 Hlm 27-33

politik yang kuat dalam kemenangan pasangan calon kepala daerah yang dapat dimanfaatkan oleh kandidat untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Jaringan politik merupakan suatu jaringan di mana ikatan-ikatan politik yang menghubungkan satu aktor politik ke aktor lainnya untuk menjalin hubungan politik yang kuat, dan terjadi interaksi politik yang berkelanjutan sehingga satu sama lain saling terikat dengan seperangkat harapan yang sama.<sup>9</sup> Jaringan politik dapat menjadi landasan utama bagi calon kepala daerah dalam melakukan kampanye politik,<sup>10</sup> melalui kerja aktor-aktor politik yang bergerak dalam membangun opini publik. Jaringan politik dapat dilihat dari dua bagian yaitu jaringan politik yang terbentuk atau baru ada saat menjelang kampanye dan jaringan politik yang sebelumnya merupakan jaringan sosial yang telah lama terbentuk di dalam suatu masyarakat, namun ketika kampanye diajak dan diminta untuk bergabung mendukung calon kandidat hingga terbentuk suatu jaringan politik.<sup>11</sup>

David Knoke mendefinisikan teori jaringan politik sebagai pendekatan struktural untuk memahami perilaku politik, dengan fokus utama pada relasi antar aktor-aktor dalam sistem sosial dan politik. Menurut Knoke, struktur dari relasi dan posisi aktor-aktor individu sangat mempengaruhi perilaku, persepsi, dan sifat dari aktor maupun sistem politik secara keseluruhan.<sup>12</sup> Sementara menurut Aspinall dan Sukmajati, terdapat tiga bentuk jaringan broker yang menjalankan patronase pada Pemilu yaitu partai politik yang secara formal memfasilitasi pencalonan dan administrasi pasangan calon kandidat, mesin-mesin jaringan sosial yang sudah terbentuk secara organik dan memiliki ikatan emosional dan tim sukses atau tim kemenangan yang dibentuk untuk membantu kandidat dalam memenangkan

<sup>9</sup> Denny JA. 2006. *Catatan Politik*. Yogyakarta: LKIS. Hlm 22

<sup>10</sup> (1) Media kampanye konvensional yang identik dengan kampanye menggunakan selebaran, pamflet, orasi dalam mimbar terbuka, maupun metode kampanye lain yang masih belum menggunakan media modern, (2) media kampanye non-konvensional, penggunaan media dan jaringan politik lebih fleksibel dan modern melalui cara-cara baru yang tepat sasaran terhadap pemilihnya, misalnya koordinasi dukungan pada komunitas, kampanye melalui media sosial, kampanye melalui gerakan dukungan, dan lainnya.

<sup>11</sup> Sofia Almaidah. 2022. Jaringan Politik dalam Pemilihan Wali Kota Makassar (Studi Kasus Kemenangan Danny Pomanto – Fatmawaty Rusdi dalam Pilwalkot Makassar 2020). *Skripsi*. Universitas Hasanuddin.

<sup>12</sup> David Knoke. 1990. *Political Networks: The Structural Perspective*. New York: Cambridge University Press. Hlm 9

Pemilu.<sup>13</sup> Pemanfaatan jaringan politik ini dibedakan menjadi beberapa tujuan yakni, memobilisasi dukungan, mendiseminasi informasi, menggalang sumber daya, membentuk opini publik, negosiasi dan koalisi, serta pengorganisasian aksi. Struktur sosial dalam jaringan politik cenderung bersifat formal, diakui, dan diatur oleh aturan hukum, norma politik dan institusi resmi seperti partai politik, lembaga pemerintahan, atau organisasi politik.

Secara umum, definisi jaringan ini menjelaskan fenomena di lingkungan sosial yang dibentuk melalui relasi di antara entitas yang tersusun dalam sistem sosial.<sup>14</sup> Posisi yang terjadi di antara aktor dan relasi inilah yang kemudian menjadi kunci utama dalam studi jaringan sosial.<sup>15</sup> Di sini, aktor tidak hanya berupa individu namun juga mencakup organisasi, kelompok, atau negara. Sedangkan, hubungan antar aktor yaitu *link* (*edge*) dan jika aktor ditulis dengan titik (*nodes*) maka *link* digambarkan dalam satu garis yang menghubungkan antar aktor.<sup>16</sup> Menurut Robert Putnam, jaringan sosial merupakan bagian dari modal sosial yang memiliki nilai serta kontrak sosial yang mempengaruhi kerja perseorangan dan kelompok. Jaringan sosial ini merujuk pada hubungan antar individu dan norma serta kepercayaan yang tumbuh melalui hubungan tersebut. Damsar menjelaskan bahwa jaringan sosial adalah hubungan yang terbentuk antara berbagai individu dalam suatu kelompok maupun antar kelompok dapat berlangsung secara formal dan informal. Hubungan tersebut mencerminkan pola kerja sama yang berdasarkan pada ikatan sosial dan hubungan timbal balik.<sup>17</sup>

Dalam kontestasi Pilkada, calon kandidat kerap memanfaatkan jaringan sosial dan politik yang dimilikinya untuk memenangkan pencalonan. Mereka akan menggunakan kepercayaan sosial (*social trust*) dalam suatu jaringan untuk mendapatkan dukungan politik. Kekuatan luasnya jaringan ini dapat menjadi modal penting atau “*capital*” bagi seorang calon kandidat dalam memobilisasi dan

<sup>13</sup> Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014 [Money politics in Indonesia: Patronage and clientelism in the 2014 legislative election]*. Research Centre for Politics and Government.

<sup>14</sup> Stephan P Borgatti, et al. 2009. *Network Analysis in the Social Science*. Science 323.

<sup>15</sup> Eriyanto. 2014. *Analisis Jaringan Komunikasi: Strategi Baru dalam penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Pranamedia Group. Hlm 5

<sup>16</sup> Ibid, Hlm 37

<sup>17</sup> Damsar. 2002. *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm 157

memenangkan kontestasi elektoral. Pemetaan jaringan sosial dapat dilakukan dengan mengklasifikasikannya ke dalam tiga jenis jaringan, (1) jaringan kepentingan (*interest*), yakni jaringan yang terbentuk dari hubungan sosial yang melibatkan kepentingan tertentu, (2) jaringan kekuasaan (*power*) yakni jaringan yang berperan dalam membentuk dan mendistribusikan kuasa, dan (3) jaringan sentimen (*centiment*) yang terbentuk dari hubungan berdasarkan ikatan emosional.<sup>18</sup>

Kajian mengenai jaringan senantiasa menjadi perhatian menarik dalam dunia akademik. Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pemanfaatan jaringan sebagai strategi dalam memenangkan kandidat pada pelaksanaan Pilkada. beberapa penelitian tersebut antara lain sebagai berikut; Hafiz Satria Putra, Asrinaldi, dan Indah Adi Putri<sup>19</sup>, Noprizal Haloho<sup>20</sup>, Cindy Indira Firdausi<sup>21</sup>, Desi Rahmawati, Wegik Prasetyo, dan Elvira Marlien<sup>22</sup>, dan penelitian yang dilakukan oleh Pimus, Fransiskus, Servatius, dan Didimus<sup>23</sup>. Penelitian tersebut bertujuan mengetahui pemanfaatan jaringan oleh kandidat dalam kontestasi politik untuk memperoleh dukungan dari masyarakat.

Hal ini digambarkan oleh penelitian dari Hafiz Satria Putra, Asrinaldi, dan Indah Adi Putri, bagaimana pengoptimalan jaringan politik yang diimplementasikan oleh kandidat calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat saat pemilihan umum, khususnya pemilihan legislatif tahun 2019. Pengoptimalan jaringan politik yang dipakai dan digunakan oleh kandidat didasari oleh adanya aktivitas kandidat sejak mahasiswa sampai menjadi anggota DPRD Provinsi.

<sup>18</sup> Hidayatullahman, et al. 2020. *Teori Sosial Empirik*. Malang: PT Literindi Berkah Karya. Hlm 166

<sup>19</sup> Hafiz Satria Putra, Asrinaldi, Indah Adi Putri. 2023. Analisa Pengoptimalan Jaringan Politik Firdaus dalam Pemilihan Legislatif tahun 2019 di Sumatera Barat. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*. Volume 10 Nomor 4.

<sup>20</sup> Noprizal Haloho. 2017. Jaringan Marga sebagai Mesin Politik Pemenangan Bupati Terpilih Periode 2015 – 2020. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*. FISIP UNDIP.

<sup>21</sup> Cindy Indira Firdausi. 2017. Jaringan Politik dalam Pilwali Surabaya tahun 2015 Studi Peran Pemuda PIS dalam mendukung Pencalonan Risma-Whisnu. *Jurnal Politik Muda*. Volume 6 Nomor 1.

<sup>22</sup> Desi Rahmawati, Wegik Prasetyo, Elvira Marlien. 2020. Personal Networks and Election in a Divided Society: Women Candidates' Strategies during the 2019 Legislative Election in Ambon Indonesia. *PCD Journal*. Volume 9 Nomor 2.

<sup>23</sup> Pimus Fransiskus, Servatius, Didimus Dhosa. 2025. Jaringan Politik DPD II Partai Golongan Karya Ngada pada Pemilihan Umum Legislatif 2024 di Kabupaten Ngada. *Journal Education and Government Wiyata*. Volume 3 Nomor 1.

Sejalan dengan penelitian sebelumnya, penelitian dari Noprizal Haloho yang menemukan bahwa kemenangan Darwin Siagian dan Hulman Sitorus dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni memanfaatkan jaringan kandidat sebagai putra daerah Toba Samosir, sebagai pendulang kemenangan serta melanjutkan strategi tim sukses dalam upaya memenangkan kandidat pada Pilkada.

Selaras dengan penelitian peneliti, menurut Cindy, pasangan calon kandidat menggunakan non partai dan non partisan dalam mendapatkan dukungan dalam memenangkan Pilkada. Selanjutnya menurut Desi Rahmawati, Wegik Prasetyo, dan Elvira Marlien, menyebutkan bahwa jaringan personal yang dimiliki oleh calon kandidat dimanfaatkan untuk mendapatkan suara pada pelaksanaan Pemilu yang dapat melampaui konsolidasi dari konstituen yakni dengan mendekati komunitas yang tidak dikenal dan melakukan pendekatan dengan masyarakat.

Berdasarkan pada temuan dan kajian penelitian terdahulu, isu mengenai jaringan politik menjadi fokus kajian yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, yakni kemenangan kandidat bergantung pada kemampuannya dalam membangun dan memanfaatkan jaringan dalam menjangkau pemilih pada kontestasi Pilkada. Pendekatan yang dilakukan oleh jaringan sosial dan politik ini saling melengkapi dan krusial untuk menggalang dukungan, menyebarkan pesan, dan memobilisasi pemilih. Kajian tentang jaringan memang sudah banyak dilakukan sebelumnya oleh para peneliti, namun ketika jaringan itu berada di era digital maka kondisi sebuah kampanye dapat berubah dan menciptakan banyak peluang baru untuk diisi oleh peneliti. Jaringan yang biasanya dibangun secara *offline*, juga dapat dibangun secara *online* tergantung bagaimana cara kerja kandidat dalam memanfaatkan jaringan yang ada serta jaringan sosial dan politik ini saling menguatkan dalam pilihan-pilihan politik masyarakat.

Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara yang dikenal memiliki karakteristik masyarakat yang heterogen, di mana mayoritas menganut agama Protestan yakni sebanyak 44,69% dari total penduduk, kemudian di ikuti oleh agama Islam sebanyak 42,84% dan Katolik 12,32% dan sisanya menganut kepercayaan selain tiga agama yang

disebutkan sebelumnya yakni Hindu, Budha, dan kepercayaan lainnya.<sup>24</sup> Selain itu, penduduk Tapanuli Tengah terdiri atas multietnik yaitu suku Batak, Nias, Minang, Jawa, dan lainnya dengan mayoritas penduduk adalah suku Batak. Sehingga hal ini menjadi faktor penting dalam membangun basis jaringan sosial dan politik serta menuntut para kandidat Pilkada untuk memiliki pemahaman mendalam tentang struktur sosial masyarakatnya. Kesuksesan dalam membangun basis jaringan sosial dan politik sangat bergantung pada kemampuan calon kandidat dan tim pemenang dalam merangkul berbagai kelompok identitas, membangun koalisi lintas batas, dan menyampaikan pesan yang relevan serta dapat diterima oleh seluruh elemen masyarakat. Sehingga pada penelitian ini, peneliti fokus kepada pemanfaatan jaringan politik oleh pasangan kandidat Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi Lubis pada pelaksanaan Pilkada Tapanuli Tengah tahun 2024.

## 1.2 Rumusan Masalah

Pilkada yang diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 27 November 2024 juga diikuti oleh kabupaten Tapanuli Tengah, provinsi Sumatera Utara. Pilkada Tapanuli Tengah diikuti oleh dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang masing-masing diusung oleh partai politik.

**Tabel 1.1**

### **Partai Politik Pengusung Calon Bupati dan Wakil Bupati**

No	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung
1	Khairul Kiyedi – Darwin Sitompul	Nasdem, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, Perindo, PKS, PBB, PKB, PSI, Gelora, PPP
2	Masinton Pasaribu – Mahmud Efendi	PDI Perjuangan, Partai Buruh

Sumber: Data Sekunder KPU Tapanuli Tengah

Pasangan calon kandidat menyampaikan visi dan misi kampanye serta gagasan jika memenangkan Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Tengah dengan bermacam-macam bentuk tawaran serta kontrak sosial yang disampaikan oleh masing-masing calon sehingga masyarakat dapat mempertimbangkan pilihannya saat pemungutan suara berlangsung. Dari hasil pemungutan suara Pilkada,

<sup>24</sup> Badan Pusat Statistika. (BPS) 2024. *Stastik Gender Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2023*. Pandan: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah. Hlm 12

menghasilkan pasangan calon nomor urut dua Masinton dan Mahmud sebagai pemenang kontestasi politik dengan perbandingan hasil suara dari pasangan calon nomor urut satu petahana (*incumbent*) Khairul dan Darwin.<sup>25</sup>

**Tabel 1.2**

**Perolehan Suara Pilkada Tapanuli Tengah tahun 2024**

No	Nama Pasangan	Perolehan Suara	Presentase
1	Khairul Kiyedi – Darwin Sitompul	74.208	46,01%
2	Masinton Pasaribu – Mahmud Efendi	87.095	53,99%

Sumber: Data Sekunder KPU Tapanuli Tengah

Berdasarkan pada tabel 1.2 hasil perolehan suara Pilkada Tapanuli Tengah tahun 2024 dapat diketahui bahwa pasangan Masinton dan Mahmud memperoleh suara terbanyak sebesar 87.095 suara atau 53,99% jumlah suara sah, dan ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Disusul oleh lawannya nomor urut dua dengan perbandingan tipis yaitu Khairul dan Darwin dengan perolehan suara 74.208 suara atau 46.01% suara sah. Dari keseluruhan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tersebar di wilayah Tapanuli Tengah yang berjumlah 251.730 orang dan tersebar di 20 kecamatan, Masinton dan Mahmud berhasil unggul di 17 kecamatan di kabupaten Tapanuli Tengah.

**Tabel 1.3**

**Identitas Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi Lubis**

Nama	Organisasi dan Pengalaman Profesional
Masinton Pasaribu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Humas Senat Mahasiswa (SEMA) Sekolah Tinggi Hukum Indonesia tahun 1997 - 1998</li> <li>• Aktivis Mahasiswa FRAME (Front Aksi Mahasiswa Reformasi dan Demokrasi) tahun 1998 – 2000</li> <li>• Pelopor Gerakan Mahasiswa dari Lembaga Perlindungan HAM (LP HAM) tahun 1998</li> <li>• Ketua Umum Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) tahun 2000-2003</li> <li>• Bergabung dengan PDI Perjuangan pada tahun 2004</li> <li>• Salah satu pendiri organisasi REPDEM (Perjuangan Demokrasi) yaitu Organisasi Sayap Partai PDI Perjuangan</li> </ul>

<sup>25</sup> Khairul Kiyedi merupakan Ketua DPRD Tapanuli Tengah Periode 2019 – 2024 yang berpasangan dengan Darwin Sitompul yang menjabat sebagai Wakil Bupati Tapanuli Tengah periode 2018 - 2022

---

Mahmud Efendi  
Lubis

- Ketua Umum REPDEM periode 2011 - 2016
  - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI periode 2014 – 2019 dari PDI Perjuangan
  - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI periode 2019 – 2024 dari PDI Perjuangan
  - Pensiunan Perwira Pertama (Pama) TNI AD
  - Ketua FKPPi Pimpinan Cabang 0211/Tapanuli Tengah
  - Ketua Badan Kesejahteraan Masjid Raya Pandan 2018 – 2024
  - Bendahara MUI Tapanuli Tengah 2023 – 2024
  - Ketua IPHI Tapanuli Tengah 2023 – 2024
- 

Kemenangan Masinton Mahmud merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji, sebagaimana pada tabel 1.3 yang memuat latar belakang organisasi serta pengalaman profesional. Masinton Mahmud memiliki latar belakang pengalaman yang berbeda yaitu Masinton yang memulai karir sebagai aktivis politik pejuang demokrasi di tahun 1998 hingga menjadi salah satu aktor politik nasional yang sudah berkarir cukup lama di lembaga legislatif DPR RI selama dua periode 2014 – 2024 dan belum pernah mencalonkan diri sebagai kandidat di eksekutif. Berbeda dengan Masinton, wakilnya Mahmud Efendi yang memiliki *track record* sebagai pensiunan TNI AD dan aktif mengikuti organisasi masyarakat di Tapanuli Tengah hingga ditawarkan menjadi calon Wakil Bupati Tapanuli Tengah tahun 2024. Peneliti melihat bahwa pengalaman karir Masinton Pasaribu di dunia politik menjadi salah satu modal penting yang digunakannya dalam membangun relasi dan jaringan politiknya dengan tokoh-tokoh masyarakat, yang sudah lama Ia bangun. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sahala Pasaribu yang merupakan salah satu pendukung Masinton dan Mahmud pada Pilkada Tapanuli Tengah yang menyampaikan bahwa<sup>26</sup>

“Masinton ini sudah anggota dua periode anggota DPR RI, jadi kita tidak lagi meragukan kemampuan dan jaringan papan atas. Begitu juga dengan Mahmud Efendi, dengan pengalaman selama menjadi TNI tentu lebih memahami keluhan masyarakat, akan lebih merakyat, mereka terbiasa melayani masyarakat bukan dilayani”

---

<sup>26</sup> Tempo.com, “Ini Sembilan Alasan Memilih MAMA pada Pilkada Tapanuli Tengah”, diakses melalui <https://www.tempo.co/info-tempo/ini-semilan-alasan-memilih-mama-pada-pilkada-tapanuli-tengah-1065368> pada tanggal 21 Mei 2025 pukul 12.30 WIB.

Pernyataan tersebut mencerminkan kekuatan jaringan politik dan sosial strategis yang dimiliki oleh pasangan calon kandidat. Masinton, sebagai aktor politik nasional yang telah membangun jaringan politik vertikal yang luas, mencakup akses ke elite nasional hingga struktur politik dan Mahmud yang mempresentasikan kekuatan jaringan sosial horizontal yang berbasis pada kedekatan dengan masyarakat. Dalam kerangka teori jaringan, perpaduan yang terjadi diantara calon kandidat dengan wakilnya menciptakan modal sosial-politik yang menyatu, sehingga memudahkan mobilisasi kampanye, hingga memperkuat legitimasi pasangan calon kandidat.

Pada awalnya PDI Perjuangan Tapanuli Tengah bersama partai politik lainnya mengusung pasangan calon Kiyedi dan Darwin untuk mengikuti kontestasi Pilkada, berdasarkan pada rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan.<sup>27</sup> Namun PDI Perjuangan Tapanuli Tengah menarik dukungannya dari pasangan Kiyedi dan Darwin, kemudian kembali mengajukan pasangan calon kandidat kepala daerah, setelah dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) DPP PDI Perjuangan nomor 1586/KPTS/DPP/IX/2024, tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah. Dalam SK tersebut, PDI Perjuangan mengusung pasangan calon Masinton dan Mahmud sekaligus mencabut SK DPP PDI Perjuangan nomor 1159.KPTS/DPP/VIII/2024 tertanggal 22 Agustus 2024. Seperti yang disampaikan oleh Sarma selaku Plt DPD PDI Perjuangan Tapanuli Tengah yakni:<sup>28</sup>

“Dengan demikian, PDIP sudah tidak lagi mendukung paslon Khairul Kiyedi dan Darwin Sitompul sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tapteng dan akan mencalonkan Masinton sebagai calon Bupati Tapanuli Tengah dan Mahmud sebagai calon Wakil Bupati”

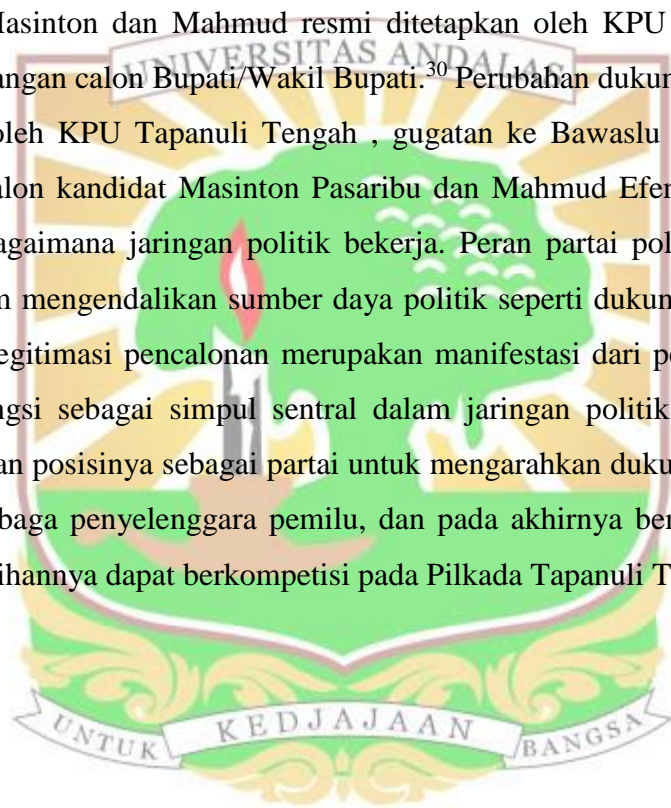
Peneliti berasumsi bahwa fondasi jaringan politik menjadi mesin utama bagi Masinton dalam mencalonkan diri sebagai calon kandidat Bupati Tapanuli Tengah, berbekal dengan jaringan yang sebelumnya ia bangun sebagai kader PDI

<sup>27</sup> RRI Sibolga, “Pasangan Kedan Peroleh Rekom PDIP Maju Pilkada Tapteng”, diakses melalui <https://www.rri.co.id/sibolga/pilkada-2024/926438/pasangan-kedan-peroleh-rekom-pdip-maju-pilkada-tapteng> pada tanggal 21 Mei 2025 pukul 12.50 WIB.

<sup>28</sup> Mistar id, “PDIP Tapteng Tarik Dukungan dari Kedan, Sarma: Jangan Urusi Internal Kami” diakses melalui <https://mistar.id/news/politik/pdip-tapteng-tarik-dukungan-dari-kedan-sarma-jangan-urusi-internal-kami> pada tanggal 22 Mei 2025.

Perjuangan dan mendapatkan rekomendasi resmi dari partai. Keputusan ini tidak hanya menetapkan Masinton dan Mahmud sebagai pasangan calon kandidat yang di usung oleh partai, namun secara efektif memobilisasi seluruh infrastruktur politik PDI Perjuangan. Majunya Masinton dan Mahmud yaitu dimulai setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan mengenai UU Pilkada.<sup>29</sup>

Meskipun pencalonan Masinton dan Mahmud sempat ditolak oleh KPU Tapanuli Tengah saat itu, PDI Perjuangan kemudian mengajukan gugatan kepada Bawaslu dan akhirnya KPU RI mengeluarkan surat ederan terkait pembukaan pendaftaran pencalonan kandidat, hingga pada tanggal 22 September 2024 pasangan Masinton dan Mahmud resmi ditetapkan oleh KPU Tapanuli Tengah sebagai pasangan calon Bupati/Wakil Bupati.<sup>30</sup> Perubahan dukungan partai politik, penolakan oleh KPU Tapanuli Tengah, gugatan ke Bawaslu hingga penetapan pasangan calon kandidat Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi Lubis menjadi dinamika bagaimana jaringan politik bekerja. Peran partai politik sebagai aktor utama dalam mengendalikan sumber daya politik seperti dukungan massa, mesin partai dan legitimasi pencalonan merupakan manifestasi dari peran partai politik yang berfungsi sebagai simpul sentral dalam jaringan politik. PDI Perjuangan menggunakan posisinya sebagai partai untuk mengarahkan dukungan, berinteraksi dengan lembaga penyelenggara pemilu, dan pada akhirnya berhasil memastikan kandidat pilihannya dapat berkompetisi pada Pilkada Tapanuli Tengah.



---

<sup>29</sup> Haris Fadhil. 2024. DetikNews, “5 Putusan MK: Parpol tanpa Kursi bisa Usung Calon hingga Syarat Usia.” Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-7500329/5-putusan-mk-parpol-tanpa-kursi-bisa-usung-calon-hingga-syarat-usia> pada tanggal 14 Februari 2024.

<sup>30</sup> DetikSumut.com, “KPU Tetapkan 2 Paslon di Pilkada Tapteng, Masinton dinyatakan lolos.” Diakses melalui [https://www.detik.com/sumut/pilkada/d-7553500/kpu-tetapkan-2-paslon-di-pilkada-tapteng-masinton-dinyatakan-lolos?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.detik.com/sumut/pilkada/d-7553500/kpu-tetapkan-2-paslon-di-pilkada-tapteng-masinton-dinyatakan-lolos?utm_source=chatgpt.com) pada tanggal 4 Mei 2024 pukul 18.20



**Gambar 1.1 Anggota DPR RI Adian Napitupulu memberikan dukungan legitimasi Pilkada kepada Masinton dan Mahmud**

Sumber: Data Sekunder Tiktok @harapanbarutapteng

Berdasarkan pada Gambar 1.1 tersebut, peneliti menilai bahwa Masinton Pasaribu juga memanfaatkan jaringan politik yang dimilikinya sebagai salah satu kader dari PDI Perjuangan untuk mempengaruhi perilaku, sumber daya, dan hasil politik pada Pilkada 2024. Salah satu kader PDI Perjuangan sekaligus anggota legislatif DPR RI Adian Napitulu datang mengunjungi Masinton Pasaribu di wilayah pemilihan Tapanuli Tengah guna membawa serta legitimasi institusional dan pengalaman politik, membuka akses ke berbagai lapisan masyarakat. Jaringan ini tidak hanya memfasilitasi mobilisasi massa melalui acara dan konsolidasi, namun juga memungkinkan penyebaran pesan kampanye yang efektif. Sebagaimana yang diketahui bahwa jaringan politik juga dapat menyerupai struktur yang terdesentralisasi yang mana dengan posisinya sebagai anggota DPR RI dapat memanfaatkan sentralitasnya dalam jaringan untuk memperluas jangkauan kampanye kepada masyarakat sebagai pemilih.

Sementara itu, menurut peneliti jaringan sosial Masinton dan Mahmud berperan sebagai penguat akar dukungan di masyarakat. Masinton Pasaribu yang dikenal sebagai tokoh politik nasional dengan akar kultural dan budaya di kawasan Tapanuli Tengah, menjadikannya sebagai sosok yang dapat diterima secara sosial oleh sekelompok masyarakat lokal, dan legitimasi yang meminimalkan hambatan penerimaan dan memungkinkan pesan kampanye disampaikan dengan lebih efektif. Untuk wakilnya, Mahmud Efendi Lubis turut mempresentasikan keberagaman

sosial dan keterhubungan dengan segmen masyarakat lainnya yang tidak dapat dijangkau oleh Masinton termasuk tokoh agama Islam, pemuda, dan komunitas adat di wilayah Tapanuli Tengah sehingga tidak ada kelompok yang merasa terabaikan.



**Gambar 1. 2 Masinton dan Mahmud bercengkrama dengan masyarakat dalam acara "Borhat-Borhat" di Kecamatan Pasaribu Tobing**

Sumber: Data Sekunder Tempo.com

Pada gambar 1.2, peneliti menilai bahwa Masinton dan Mahmud memanfaatkan jaringan suku Batak terutama Batak Toba, yang turut memainkan peran dominan dalam pembentukan jaringan dukungan politik melalui Marga atau *klan* yang kemudian dikemas dan dimanfaatkan dalam kampanye politik. Masinton Pasaribu yang berasal dari marga Batak Toba memiliki koneksi kuat dengan masyarakat Batak Toba, dan ini memperkuat jaringan dukungan di wilayah kecamatan hingga desa pedalaman di wilayah Tapanuli Tengah. Jaringan suku Batak yang dimanfaatkan berfokus pada dua pilar utama yakni sistem kekerabatan tradisional dan komunitas etnis. Secara konsep, jaringan ini digerakkan melalui sistem *Dalihan Na Tolu*, yakni filosofi kekerabatan yang mencakup ikatan marga (*Dongan Tubu*), pihak pemberi istri (*Hula-Hula*), dan pihak penerima istri (*Boru*). Ikatan Marga dan kekerabatan ini menjadi basis utama dalam mobilisasi politik, di mana kesamaan Marga sering dimanfaatkan oleh calon kepala daerah dan tim pemenangan dalam menggalang suara dan dukungan yang solid.



**Gambar 1.3 "Upah-Upah" Marga Lubis dan Marga Simatupang**

Sumber: Data Sekunder Tiktok @harapanbarutapteng

Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, dukungan juga diberikan oleh pihak Marga dari istri calon kandidat dalam konteks kekerabatan Batak yang merujuk pada peran *Hula-Hula* atau pihak pemberi istri dalam kerangka *Dalihan Na Tolu*. Keterlibatan aktif dari *Hula-Hula* memberikan legitimasi moral dan budaya yang tinggi kepada menantu mereka, yang kemudian akan meningkatkan citra kandidat sebagai seorang yang menjunjung tinggi kehormatan kekeluargaan. Diikuti dengan Mahmud Efendi Lubis yang berlatar belakang suku Mandailing menjadi jembatan penting untuk membangun kepercayaan masyarakat suku Batak Islam kepada para pemilih di Tapanuli Tengah yang sebelumnya tidak dapat dijangkau oleh Masinton Pasaribu. Hal ini memastikan bahwa kampanye dapat menjangkau spektrum yang lebih luas dari masyarakat Tapanuli Tengah yang secara sosial dan kultural beragam, Mahmud Efendi Lubis bertindak sebagai jembatan ke segmen masyarakat yang mungkin memiliki kepentingan atau identitas yang berbeda.

Kemampuan pasangan ini untuk masuk ke jaringan sosial religius menjadi faktor penting dalam memperluas basis dukungan di luar etnis Batak Toba. Dengan demikian, pasangan Masinton dan Mahmud menunjukkan bagaimana sebuah kampanye dapat menggabungkan kekuatan ikatan kuat (*strong ties*) yang memberikan kepercayaan dan mobilisasi loyal dengan (*weak ties*) dan

menjadikannya sebagai modal sosial yang menjangkau keberagaman dan akses informasi serta sumber daya baru dalam menarik dukungan masyarakat Tapanuli Tengah pada Pilkada 2024.



**Gambar 1.4 Pelegaran Seni Budaya dan Temu Ramah tokoh inspirasi "Ono Niha" di Kecamatan Badiri Tapanuli Tengah**

Sumber: Data Sekunder Tempo.com

Selain dari marga Batak, kabupaten Tapanuli Tengah juga dihuni oleh masyarakat suku Nias, Masinton memanfaatkan jaringan politiknya dalam menggapai pemilih yang bersuku Nias melalui Yasonna Laoly yang merupakan aktor politik nasional. Yasonna Laoly mengajak warga Nias yang berdomisili di kabupaten Tapanuli Tengah untuk kompak memilih dan memenangkan Masinton dan Mahmud pada pelaksanaan Pilkada serentak yang menyampaikan bahwa:<sup>31</sup>

“Masinton Pasaribu ini sahabat saya, adik saya. Dia seorang petarung di zaman reformasi. Pasukan gorong-gorong, Repdem, dan Mahmud Efendi Lubis adalah pasangan yang pas. Mahmud adalah seorang pensiunan tentara yang tak mengenal takut, perang pun dia mau, maka lengkap sudah pasangan ini.”

Dukungan politik yang disampaikan oleh Yasonna Laoly untuk Masinton dan Mahmud dilakukan dengan tujuan agar lebih memperhatikan masyarakat Nias yang tinggal di pelosok desa Tapanuli Tengah. Dukungan yang diberikan ini dapat menarik dukungan kolektif dari suku Nias, yang umumnya sangat loyal terhadap pemimpin yang dianggap dekat. Sehingga jaringan sosial yang berbasis etnis tidak

<sup>31</sup> Tempo.com, “Yasonna Laoly Ajak Warga Nias Pilih Masinton-Mahmud di Pilkada Serentak 2024” diakses melalui <https://www.tempo.co/info-tempo/yasonna-laoly-ajak-warga-nias-pilih-masinton-mahmud-di-pilkada-serentak-2024-1172386> pada tanggal 21 Mei pukul 22.00 WIB

hanya berfungsi sebagai alat mobilisasi, namun juga dapat menjadi sarana komunikasi politik dan pembentukan legitimasi. Menurut asumsi peneliti, pasangan Masinton dan Mahmud memiliki keuntungan strategis dalam melihat dan mengintegrasikan kekuatan berbagai jaringan ke dalam strategi kampanye untuk menarik dukungan suara masyarakat Tapanuli Tengah. Hal ini dikarenakan keberhasilan tidak hanya bergantung pada kekuatan jaringan politik formal dari partai politik, namun juga pada kemampuan kandidat dalam menjalin dan merawat jaringan sosial etnis yang majemuk.



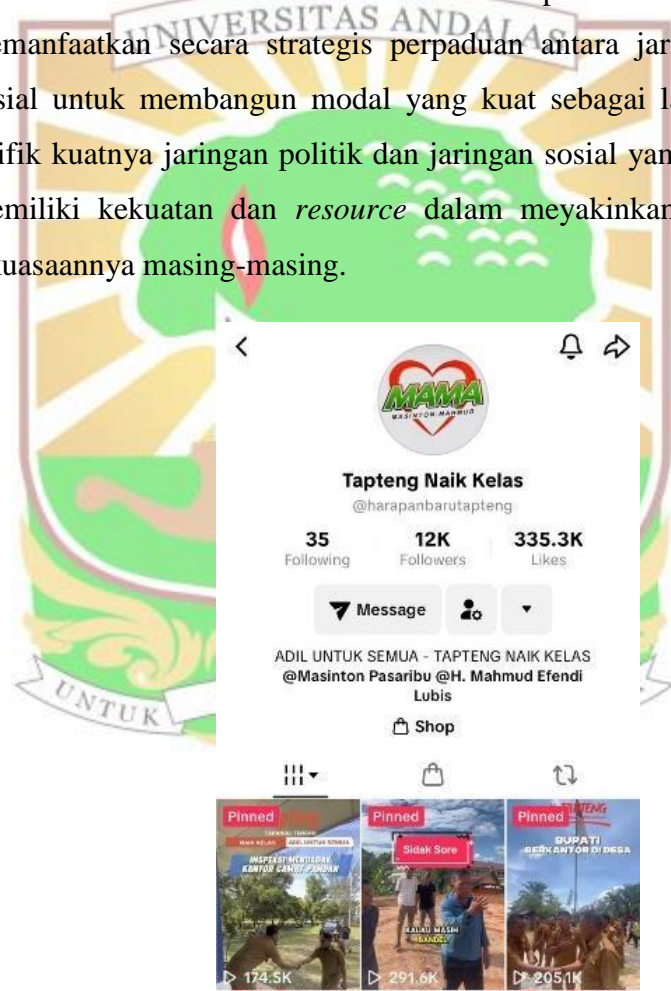
**Gambar 1. 5 Pendekatan dengan Jaringan Profesi di Tapanuli Tengah**

Sumber: Data Sekunder @harapanbarutapteng

Dalam menjangkau pemilih, Masinton dan Mahmud juga memanfaatkan jaringan profesi yang ada di wilayah Tapanuli Tengah. Ikut serta berinteraksi memperlihatkan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat dengan cara melakukan pendekatan-pendekatan terhadap jaringan yang dimiliki oleh Masinton dan Mahmud. Mayoritas pencaharian utama penduduk Tapanuli Tengah adalah pertanian dan perikanan sehingga seperti pada gambar 1.6, Masinton dan Mahmud melakukan pendekatan dengan para pekerja. Pendekatan ini memungkinkan penyebaran informasi yang lebih luas dan menjangkau beragam individu, termasuk mereka yang memiliki profesi informal maupun formal. Strategi yang dilakukan oleh Masinton dan Mahmud menggabungkan jangkauan luas dengan menargetkan jaringan profesi yang relevan, menunjukkan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika jaringan sosial untuk memobilisasi dukungan politik. Pendekatan tatap muka dengan kelompok jaringan memiliki peran penting dalam kampanye ini.

Bertemu langsung dengan masyarakat memungkinkan pasangan Masinton dan Mahmud dalam membangun hubungan yang lebih personal dan autentik serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan umpan balik terkait isu-isu yang ada di lingkungan masyarakat.

Jika dilihat dari rekam jejak Masinton dan Mahmud, kombinasi ini membentuk jaringan sosial yang luas dan inklusif, yang menjadi landasan kuat dalam membangun basis dukungan politik berbasis kedekatan sosial dan kultural budaya di Tapanuli Tengah hingga berhasil memenangkan Pilkada. Sinergi antara jaringan politik yang terorganisir secara institusional dan jaringan sosial yang terbentuk melalui relasi interpersonal serta identitas lokal menjadi kekuatan politik pasangan Masinton dan Mahmud dalam Pilkada Tapanuli Tengah tahun 2024. Dengan memanfaatkan secara strategis perpaduan antara jaringan politik dan jaringan sosial untuk membangun modal yang kuat sebagai landasan elektoral. Secara spesifik kuatnya jaringan politik dan jaringan sosial yang saling berkaitan tersebut memiliki kekuatan dan *resource* dalam meyakinkan para pemilih di wilayah kekuasaannya masing-masing.



**Gambar 1. 6 Akun TikTok Kampanye Masinton Mahmud**

Sumber: Data Sekunder @harapanbarutapteng

Selain memanfaatkan kedua jaringan yang berbasis *offline*, pasangan Masinton dan Mahmud juga memanfaatkan konten yang relevan dan menarik, yakni dengan memiliki platform *online* seperti Tiktok untuk menyampaikan visi dan misi, pesan kampanye, hingga membangun citra dan branding politik yang terintegrasi. Konvergensi jaringan sosial dan politik berbasis *online* ini saling berinteraksi dan menguatkan pilihan politik masyarakat. Melalui media sosial, pasangan Masinton dan Mahmud tidak hanya menyampaikan informasi terkait visi, misi, dan program kerja, namun juga berupaya membangun narasi positif yang melibatkan masyarakat sebagai pemilih dalam percakapan politik. Pasangan Masinton dan Mahmud menggabungkan penggunaan media digital dan tradisional dalam menjangkau khalayak yang lebih luas.

Selain itu asumsi awal peneliti dalam penelitian ini, juga dibangun dari fakta bahwa Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi merupakan pasangan calon kandidat yang diunggulkan oleh masyarakat Tapanuli Tengah. Berdasarkan pada hasil survey yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) bahwa pasangan ini disukai oleh 81,2% dari 82,7% responden.<sup>32</sup> Dalam survei tersebut ditemukan bahwa sebanyak 89,1% menginginkan Bupati dan Wakil Bupati yang mempunyai rekam jejak bersih dan memiliki jaringan ke pemerintah pusat guna mendapatkan dukungan APBD yang memadai untuk pembangunan infrastruktur di Tapanuli Tengah. Pengamat Politik dan Ekonomi, Dedi Rohaman menanggapi hasil survey yakni:

“Di mana tingkat keterkenalan atau popularitas pasangan ini masuk dalam kategori popularitas sosiometrik. Perihal ini, Masinton – Mahmud dikenal akibat daya tarik individu, yang disukai karena berbagai sifat baiknya. Sementara popularitas dari lawannya termasuk dalam kategori popularitas *perceived* terkenal namun jarang disukai.”

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Robert Putnam bahwa hubungan sosial yang stabil dan saling percaya menciptakan modal sosial yang dikonversikan menjadi dukungan politik atau kekuasaan, sementara jaringan politik yang terbetuk secara vertikal melalui struktur formal partai politik turut menjadi mesin politik

---

<sup>32</sup> Teropong Senayan. Com, “Masinton Pasaribu –Mahmud Efendi Ungguli Survei Pilkada Tapanuli Tengah”, diakses melalui <https://www.teropongsenayan.com/133562-masinton-pasaribu-mahmud-efendi-ungguli-survei-pilkada-tapanuli-tengah> pada tanggal 28 Juni 2025 Pukul 16.30 WIB.

yang mengukuhkan dukungan institusional terhadap pasangan calon kandidat. Sehingga pada penelitian ini, peneliti mencoba untuk menelusuri lebih lanjut jaringan politik dan jaringan sosial Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi Lubis pada Pilkada Tapanuli Tengah tahun 2024. Daya tarik penelitian ini adalah interaksi yang terjadi antara jaringan politik yang melibatkan (partai politik dan elite partai) dan jaringan sosial (masyarakat, komunitas, relasi personal) saling berinteraksi dan berkontribusi dalam pembentukan modal sosial. Peneliti berasumsi bahwa besarnya peran serta pengaruh yang diberikan oleh jaringan politik dan jaringan sosial tersebut hadir di tengah-tengah masyarakat. Penelitian ini juga memberikan ruang untuk mengeksplorasi dinamika politik pusat dan daerah yang saling berinteraksi, hingga membuka ruang kajian tentang dua bentuk jaringan yang dikonstruksi dalam kampanye dan digunakan dalam menarik suara pemilih pada hari pemungutan suara. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan jaringan politik Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi Lubis pada Pilkada Tapanuli Tengah tahun 2024?
2. Bagaimana pemanfaatan jaringan yang dimiliki oleh Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi Lubis pada Pilkada Tapanuli Tengah Tahun 2024?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang dan masalah penelitian yang telah peneliti paparkan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mendeskripsikan peran dan proses jaringan politik Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi Lubis pada Pilkada Tapanuli Tengah tahun 2024.
2. Untuk menganalisis pemanfaatan jaringan sosial dan jaringan politik yang dimiliki oleh Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi Lubis pada Pilkada Tapanuli Tengah Tahun 2024.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan yang relevan dalam kajian mengenai jaringan yang dimiliki oleh kandidat. Selain itu, temuan dan jaringan informasi yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya, baik oleh peneliti maupun lembaga politik dalam memahami dan menganalisis dinamika politik tingkat lokal.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat mengkaji secara kritis upaya optimalisasi dan pemanfaatan struktur jaringan yang dimiliki oleh pasangan calon, dengan melihat bagaimana jaringan tersebut menjadi saran yang efektif dalam menjangkau pemilih karena didukung oleh basis massa yang relatif stabil. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami sejauh mana peran jaringan tersebut dalam lingkungan sosial terkhusus pada tokoh-tokoh yang diminati oleh masyarakat.

